

HIDUP HARMONI DALAM KERAGAMAN KEYAKINAN AGAMA: PERSPEKTIF PENGHAYAT KEPERCAYAAN

LIFE HARMONY IN DIVERSITY OF RELIGIOUS FAITH: BELIEVE'S PERSPECTIVE

Engkus Ruswana

Presidium DMP MLKI

Email: eruswana@gmail.com

ABSTRAK

Masalah intoleransi dan radikalisasi sejak era reformasi terus berkembang dan semakin mengkhawatirkan karena terbukanya ruang-ruang yang luas bagi kelompok-kelompok yang mengusung paham radikalisme untuk mengembangkan diri, sebagai konsekuensi diterapkannya demokrasi yang luas di Indonesia. Penyebaran paham intoleransi dan radikalisme kian meluas dan telah menyusup ke berbagai institusi pemerintahan, kepolisian, dan militer. Bahkan, telah menyusup ke dalam institusi pendidikan dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi makin parahnyanya persoalan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, perlu upaya keras semua pihak untuk menghidupkan kembali moderasi beragama dan hidup harmoni dalam perbedaan keyakinan agama, sebagaimana sudah diterapkan lama dalam kehidupan leluhur bangsa sejak zaman peradaban kuno. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sistem dan nilai kearifan lokal bangsa dengan genetika moderasi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Hal ini bukan sekadar konsep, namun sudah diimplementasikan sejak ribuan tahun yang lalu. Metode yang digunakan berupa studi literatur. Ungkapan hasil pemikiran dan kajian penulis didasarkan pada pengalaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebagai warga negara yang berkeyakinan di luar agama mainstream. Beberapa hal yang perlu menjadi bahan diskusi adalah hubungan antara alam lingkungan semesta (habitat) dan karakter manusia penghuninya.

Kata Kunci: moderasi beragama, harmoni, keragaman, karakter, kearifan lokal

ABSTRACT

The problem of intolerance and radicalization since the reformation era has continued to grow. It is increasingly worrying due to the opening of wide spaces for groups carrying radicalism to develop themselves due to the widespread implementation of democracy in Indonesia. The spread of intolerance and radicalism is increasing and has infiltrated various government institutions, police institutions, and the military. It has even infiltrated educational institutions from PAUD (Early Childhood Education) to university levels. Therefore, to overcome the serious problem of national and state harmony, it is necessary to make strong efforts from all parties to revive religious moderation and live in harmony with differences in religious beliefs, as has been applied since ancient civilizations. This paper aims to reveal that Indonesia has the potential of the nation's local wisdom system and values with the genetics of moderation and harmony in religious life. It is not just a concept but has been implemented thousands of years ago. The method used is in the form of literature studies and expressions of results. The author's thoughts and reflections are based on experience in living social and national life as citizens who believe outside of mainstream religion. Some things that need to be discussed are related to the relationship between the natural environment (habitat) and the character of the human inhabitants.

Keywords: religious moderation, harmony, diversity, character, local wisdom.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan dikenal sebagai bangsa yang religius. Indonesia hingga kini masih melekat dengan nama Nusantara dan sejak zaman kuno banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa di dunia. Hal

ini dikarenakan letak geografisnya yang strategis, berada di jalur pelayaran internasional yang padat, dan menghubungkan dua wilayah peradaban maju Negeri Cina di Timur Jauh Asia serta negeri Hindustan, Persia, dan Mesir di kawasan

Barat Asia dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut di zaman kuno sudah berperadaban maju. Posisi Nusantara yang strategis sebagai tempat perjumpaan bangsa-bangsa berperadaban maju membuat kawasan Nusantara sendiri juga memiliki peradaban yang maju.

Lokasi dan fungsi strategis Nusantara dalam pelayaran dan perdagangan dunia di zaman kuno membuat banyak saudagar dari Cina, Hindia, dan Arab berdatangan untuk berniaga dan tinggal di kota-kota pelabuhan wilayah Nusantara. Saudagar-saudagar tersebut datang membawa kebudayaan dan agama yang dianutnya sehingga berbagai agama dunia berkembang, bahkan pernah mencapai masa keemasannya di wilayah Nusantara.

Sebelum masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara, leluhur bangsa Indonesia sudah memiliki sistem keyakinan (agama) dan menjalankan peribadatnya. Kedatangan agama Hindu dan Buddha pada masa pra-Islam ke Nusantara diterima dengan baik, bahkan dibantu pengembangannya oleh leluhur bangsa Indonesia. Agama-agama yang datang dari luar Nusantara diserap untuk mengisi bagian-bagian yang kurang dan melengkapi (memperkaya) aspek-aspek kebudayaan dan spiritual yang belum dimiliki atau belum terdefiniskan pada sistem spiritual leluhur bangsa Indonesia. Menurut Coedes (Wibowo, 2020: 21), hal ini kemudian mengisi bagian atas (*super stratum*), sedangkan lapisan dasarnya (*sub-stratum*) yang merupakan sistem keyakinan asli Nusantara tetap kukuh dan tidak mengalami perubahan. Pendapat ini diperkuat oleh Rachmat Subagya (1979: 22–23) yang menyatakan bahwa dari peninggalan zaman Hindu-Indonesia, entah berupa candi, arca atau tulisan, agama Hindu murni tidak pernah menjadi milik bangsa Indonesia. Raja-raja maupun rakyat melangsungkan penghayatan paham asli, yang di sana-sini dihias secara lahir dengan lapisan Hindu. Hinduisme tenggelam dalam lautan pemikiran asli, dimanfaatkan untuk lebih menegaskan pandangan hidup Indonesia yang masih samar-samar. Buddhisme mengalami nasib yang lebih buruk daripada Hinduisme di Indonesia. Paham Moksya dan Maya yang mengingkari kenyataan dunia bertentangan mutlak dengan

tanggapan positif terhadap dunia yang berlaku di Indonesia. Istilah Buddhis masuk ke dalam kosakata bahasa-bahasa Nusantara, tetapi makna asli diolah untuk menggambarkan angan-angan dan paham tradisional Indonesia. Buddhisme di Sriwijaya relatif lebih murni, tetapi dengan adat *dharmayatna*-nya diratakan dengan agama asli juga.

Selanjutnya, menjelang akhir abad ke-13, Islam muncul di ujung Barat Nusantara, mulai dari wilayah Pasai, kemudian bergerak ke Timur dan Selatan sepanjang pesisir Sumatra, dan kemudian menyeberang ke sepanjang pesisir utara Jawa, terus ke wilayah Timur Indonesia NTB, Sulawesi, dan Maluku Utara. Di sanalah para saudagar/pedagang, mubalig muslim, para syahbandar, para wali, dan para penguasa wilayah berhasil mendirikan kesultanan tempat Islam menjadi agama negara/kerajaan, yang kemudian menggeser dan menggantikan agama sebelumnya. Datangnya Islam ke Nusantara diterima dengan baik oleh masyarakat bangsa Nusantara, sebagaimana dengan kedatangan Hindu dan Buddha karena pada awalnya Islam datang secara damai dengan menghormati dan menyesuaikan terhadap sistem nilai kearifan lokal yang hidup dan berlaku di masyarakat. Namun, ketika kepentingan penyebaran Islam dikaitkan dengan politik kekuasaan dan perebutan sumber-sumber ekonomi, perjumpaan Islam dengan agama sebelumnya dan dengan agama pribumi Nusantara mulai menimbulkan konflik. Terjadi penghancuran kerajaan-kerajaan yang bercirikan agama leluhur maupun sinkretis Hindu-Buddha. Majapahit hancur digantikan kebesaran kesultanan Demak, kemudian Mataram. Kerajaan Talaga, kerajaan Galuh, dan Sunda-Pajajaran hancur berganti dengan kebesaran kekuasaan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.

Sejalan dengan perkembangan Islamisasi di Indonesia dan terbukanya akses pelayaran internasional yang dapat meningkatkan akses perjumpaan antarbangsa, tak terhindarkan membuka juga peluang berkembangnya paham dan tumbuhnya gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme keagamaan. Perkembangan paham dan gerakan intoleransi tersebut mulai

mengancam retaknya perahu besar Republik Indonesia.

Tulisan dengan judul “Hidup Harmoni dalam Keragaman Keyakinan Agama – Perspektif Penghayat Kepercayaan” ini merupakan ungkapan pikiran dan pemahaman penulis. Tulisan ini tidak terlepas dari pengetahuan serta pengalaman penulis sebagai penggiat dan pengurus organisasi penghayat kepercayaan yang aktif membangun jejaring komunikasi dan bekerja sama dengan berbagai entitas lintas agama maupun penggiat HAM dan demokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperjuangkan kesetaraan kedudukan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dapat sejajar dengan penganut agama lainnya yang “diakui” negara. Hal ini termasuk memperjuangkan penghapusan diskriminasi agar masyarakat penghayat kepercayaan dapat memperoleh hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial-budaya, serta kesetaraan layanan dari negara.

Penulis yang sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung sebagai pengurus pusat wadah bersama organisasi-organisasi penghayat kepercayaan tingkat nasional seringkali dihadapkan dengan kebutuhan untuk memahami keanekaragaman ajaran-ajaran komunitas kepercayaan di seluruh Nusantara. Di samping itu, juga keingintahuannya yang besar terhadap substansi nilai-nilai luhur kearifan lokal dan tuntutan hidup dari setiap komunitas penghayat, termasuk mengkaji kesamaan dan perbedaannya. Penulis juga sering mengklarifikasi stigma-stigma negatif yang hidup di masyarakat, baik melalui paparan dalam diskusi terpumpun, lokakarya, diseminasi, dan seminar, maupun dalam bentuk publikasi.

Untuk melengkapi dan memperkuat ungkapan-ungkapan pada naskah ini, penulis juga menggunakan beberapa literatur, baik yang terkini hingga yang terdahulu, mengingat tidak banyak literatur yang mengungkap nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu, masalah moderasi beragama merupakan narasi yang relatif baru dalam perbincangan masyarakat meskipun secara substansi sesungguhnya sudah menjadi jiwa dan perilaku hidup sehari-hari sebagian besar bangsa Indonesia. Selain literatur

dari sumber buku, juga diambil literatur dari catatan-catatan pemberitaan media daring yang relevan.

Terdapat beberapa hal yang menurut penulis menarik untuk didiskusikan tentang hipotesis dan kajian yang diungkapkan dalam tulisan ini, yaitu:

1. karakter dasar manusia akan ditentukan oleh kondisi/karakter alam tempat kehidupannya karena terbentuk akibat interaksi manusia dengan alam lingkungannya dari generasi ke generasi.
2. karakter dasar diperkaya dengan hasil olah pikir dan olah rasa/batin. Hal ini akan melahirkan sistem nilai & kearifan yang diterapkan dalam kehidupan keseharian dan tradisi yang kemudian menjadi budaya, yang terbentuk sejak era nenek moyang bangsa Indonesia di zaman kuno.
3. sikap moderasi beragama dan sikap toleransi, yaitu inklusif dan hidup harmoni bergotong-royong dalam perbedaan keyakinan agama merupakan karakter dasar bangsa Indonesia sebagai keniscayaan. Alam telah membentuknya selama berabad-abad.
4. konflik terjadi ketika budaya dan nilai-nilai hidup dari suatu bangsa yang tidak sesuai dipaksakan untuk diterapkan pada bangsa lainnya. Selain itu, adanya upaya-upaya untuk meminggirkan/mencabut nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan banyak dianut sebagian besar masyarakat.
5. moderasi beragama, sikap hidup toleran, dan mengusung hidup harmoni dalam keberagaman keyakinan agama merupakan kunci kerukunan hidup, kebahagiaan, kemajuan bangsa, dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Tuntunannya sudah terkandung dalam pandangan hidup dan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

ALAM MEMBENTUK KARAKTER MANUSIA PENGHUNINYA

Kehidupan manusia, baik secara lahiriyah maupun secara batiniyah (spiritual) tidak mungkin bisa

dilepaskan dari alam dan lingkungan tempat mereka hidup. Manusia sebagaimana juga makhluk lainnya hidup di alam dan hidup dari alam. Interaksi manusia dengan alam lingkungan sepanjang hidupnya dari generasi ke generasi secara berevolusi membentuk postur tubuh dan karakter dasar manusia penghuninya yang sudah beradaptasi dengan alam dan lingkungan tempat mereka hidup. Dengan demikian, karakter orang pegunungan akan berbeda dengan karakter orang pesisir. Begitu pun karakter orang yang berasal dari lingkungan alam yang kondisinya gersang/kurang subur dengan sumber alam yang terbatas akan berbeda dengan karakter orang yang berasal dari lingkungan yang kondisi alamnya subur makmur dan indah permai. Begitu pun dengan iklim, karakter bangsa yang berasal dari kawasan yang memiliki empat musim akan berbeda dengan karakter bangsa yang hanya mengalami dua musim.

Kondisi alam dan lingkungan hidup yang keras dengan sumber alam terbatas melahirkan karakter penghuninya yang juga berjiwa keras, tidak mudah mengalah (ngotot), pekerja keras, kurang ramah, mudah marah, memiliki jiwa bersaing, suka curiga dan rentan bermusuhan. Alam mengajarkan dan membentuk pengalaman manusia penghuninya untuk bisa bertahan hidup, mereka harus siap bersaing/berebut atas sumber daya alam yang terbatas. Bila perlu, saling berperang untuk menguasai sumber-sumber hidup sehingga melahirkan budaya perang yang dapat berdampak kurang menghargai nilai-nilai hidup, serta melahirkan penerapan hukum rimba, siapa kuat dia yang berkuasa. Kondisi alam yang keras dan budaya berperang akan membutuhkan orang kuat dan pintar berperang sehingga berdampak pada sistem nilai yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Apalagi dengan budaya perang yang menguasai dan merampas harta musuhnya, serta merampas para perempuan musuhnya sebagai tawanan saat memenangkan peperangan. Hal inilah yang melahirkan perbudakan. Masyarakat yang dibentuk oleh alam yang keras/gersang, dan sumber alam yang terbatas akan melahirkan komunitas yang kuat kekerabatan sukunya, namun mudah berkonflik dengan suku lainnya.

Manusia yang hidup pada kondisi alam lingkungan yang memiliki empat musim juga melahirkan karakter dasar manusia pekerja keras. Alam menempanya untuk memiliki budaya menabung (mengumpulkan bahan untuk kelangsungan hidup) dan budaya berencana untuk mempersiapkan dirinya ketika alam mengurungnya di rumah. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa berpindah-pindah ketika musim dingin tiba. Itulah sebabnya dunia perencanaan dilahirkan oleh masyarakat yang memiliki empat musim.

Sementara itu, bagi manusia yang hidup di alam lingkungan yang subur dan berasal dari lingkungan tropis, alam menyediakan kebutuhan hidupnya sepanjang tahun lebih dari cukup. Kapan saja dibutuhkan tinggal mengambil di alam, tanpa harus susah payah sehingga hubungan batin antara dirinya dan alam sangat dekat. Alam lingkungan yang ramah dan subur-makmur melahirkan karakter manusia yang juga ramah, tidak suka berkonflik, dan selalu mengupayakan hidup harmoni, termasuk dalam kehidupan beragama sehingga jauh dari sikap hidup ekstrem. Mereka bersikap ramah, menghormati, dan menerima dengan baik kaum pendatang tanpa kecurigaan, bahkan senang membantu menyediakan kebutuhannya karena alam menyediakan cukup. Sikapnya akan selalu mendahulukan kedamaian serta menghindari konflik dan peperangan. Namun, apabila sudah merasa sangat tertindas dan melewati batas kesabarannya, akan muncul sikap kerasnya untuk melawan walaupun harus mempertaruhkan jiwa-raganya.

Masyarakat Indonesia, sejak zaman nenek-moyang, hidup dari generasi ke generasi pada kawasan dunia yang alamnya secara umum subur-makmur, indah permai, kaya dengan berbagai sumber daya alam, dan iklimnya yang tropis tidak membatasi untuk beraktivitas sepanjang tahun. Karena kondisi alam lingkungan hidupnya, bangsa Indonesia memiliki karakter dasar manusia yang ramah, penyabar, suka berkumpul, mengusung rasa kebersamaan/kekeluargaan, menerima dan menghormati tamu dan pendatang tanpa rasa curiga, suka menolong, tidak suka berkonflik, dan selalu menjaga harmoni dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Namun,

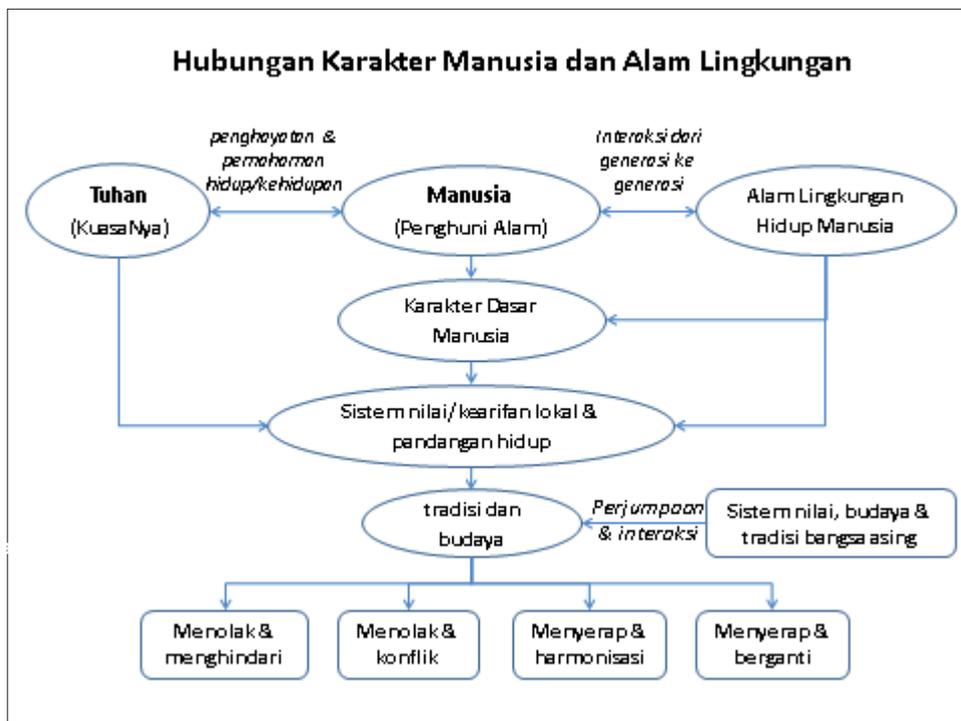
dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya sistem transportasi, yang memungkinkan meningkatnya daya jelajah manusia ke berbagai belahan dunia, terjadi perjumpaan-perjumpaan antarbangsa dan antarbudaya yang makin luas dan makin kompleks. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya saling memengaruhi, saling menyerap, dan munculnya berbagai konflik, yang memungkinkan perubahan budaya suatu bangsa.

KEBERAGAMAN DAN PERBEDAAN ADALAH KEHENDAK TUHAN

Jikalau kita memandang kebun bunga, manakah yang lebih indah dan menarik hati untuk dinikmati? Apakah kebun bunga yang sejenis ataukah kebun bunga yang beraneka ragam, baik jenis, rupa, bentuk, maupun warnanya? Niscaya jawabannya adalah kebun bunga yang beraneka ragam lebih menarik dan lebih indah. Begitu pula kalau kita membandingkan hamparan luas kebun kelapa sawit, hamparan luas kebun karet, hamparan luas tanaman hutan pinus, dan hamparan luas hutan alami, manakah yang paling bermanfaat bagi kehidupan? Tentu

yang akan lebih bermanfaat adalah hamparan luas hutan alami yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman besar maupun kecil serta dihuni oleh berbagai satwa yang menguatkan ekosistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam penyediaan sumber air dan sumber udara (oksigen), bahkan sumber makanan. Hutan sejenis atau perkebunan tanaman sejenis merupakan hasil rekayasa manusia, sedangkan hutan dengan tanaman yang beraneka ragam tumbuh secara alamiah. Artinya, keberagaman lebih bermanfaat dan berguna daripada keseragaman, dan keberagaman akan tumbuh secara alami (kehendak alam), yang berarti keberagaman adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pemahaman perihal keberagaman dan pemaknaan hidup dalam keragaman maupun perbedaan sudah begitu kental dihayati anak bangsa sejak zaman nenek-moyang bangsa Indonesia. Pemahaman makna keberagaman diperoleh dari hasil kajian dan penghayatan leluhur bangsa Indonesia atas relasi dan interaksinya dengan alam dan lingkungan hidupnya yang sangat kaya dengan keragaman, serta hasil kajian dan penghayatan hidup dan kehidupan ke dalam dirinya.



Sumber: Hasil analisis penulis

Gambar 1. Hubungan Karakter Manusia dan Alam Lingkungan

Hasil pengkajian terhadap diri sendiri sebagai manusia dan pemaknaan hidup dalam diri, akan menimbulkan kesadaran bahwa di dalam diri manusia sesungguhnya penuh dengan perbedaan. Contohnya, diri kita memiliki tangan, kaki, hidung, mulut, mata, dan telinga yang masing-masing mempunyai bentuk, fungsi, dan kesenangan/keinginan yang berbeda. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan dari masing-masing atau salah satu anggota badan tersebut, badan kita secara otomatis (refleks) akan memerintahkan semua anggota badan untuk bekerja sama. Misalnya telinga ingin mendengarkan musik maka tangan, kaki, dan mata akan bekerja memenuhi kebutuhan telinga. Penghayatan atas kenyataan ini menghasilkan pemahaman bahwa perbedaan bukan menjadi masalah. Justru perbedaan adalah keniscayaan dan kehendak Tuhan untuk saling melengkapi dan saling bekerja sama.

Melangkah lebih lanjut keluar dari diri, dengan mengkaji dan menghayati alam semesta, niscaya kita akan menemukan bahwa alam semesta ini penuh dengan keragaman dan perbedaan yang tak terhitung banyaknya. Masing-masing memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan seluruh pengisi alam. Tidak ada satu makhluk pun di bumi yang tidak membutuhkan alam semesta, bahkan ruang hidup serta keberlangsungannya pun memang berada dan membutuhkan alam.

Manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mutlak membutuhkan keberadaan makhluk lainnya, baik yang berasal dari berbagai macam tumbuhan maupun hewan. Selain itu, manusia juga membutuhkan kerja sama dengan manusia lainnya, baik yang sesama profesi/keahlian maupun yang berasal dari keahlian yang berbeda, termasuk dari perbedaan pendapat/pemikiran. Dengan demikian, hasil kajian dan penghayatan terhadap alam semesta maupun terhadap makhluk penghuni alam lainnya menghasilkan pandangan hidup dan pemahaman bahwa keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, perlu disadari dan dipahami pentingnya kerja sama dan hidup harmoni dalam keragaman, termasuk dalam keragaman berkeyakinan/beragama.

Kesadaran pemahaman persoalan ini sudah melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak nenek-moyang zaman purba hingga generasi masa kini. Hal ini tecermin dalam tuntunan hidup dan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut. Walaupun saat ini sudah mulai menyusut, tererosi oleh pengaruh pemahaman makna hidup dan kehidupan yang bersumber dari ajaran dan budaya bangsa lain.

MODERASI BERAGAMA DAN TOLERANSI KENISCAYAAN KARAKTER DASAR BANGSA INDONESIA

Moderasi beragama dalam catatan sejarah bangsa Indonesia

Seperti dijelaskan sebelumnya, alam lingkungan tempat manusia hidup akan membentuk karakter suatu bangsa sebagai hasil interaksinya dengan alam dari generasi ke generasi. Lingkungan alam Nusantara memiliki kondisi subur, indah, permai dan kaya dengan sumber alam, dengan morfologi wilayah yang beragam mulai dari lautan, pantai/pesisir, dataran, perbukitan dan pegunungan, serta berada di posisi geografis yang strategis dan posisi astronomis di kawasan tropis yang kaya dengan benda-benda langit di atasnya. Hal ini menghasilkan karakter bangsa yang ramah, menghormati yang datang dengan prinsip memandang orang lain sebagaimana memandang kepada diri sendiri, berpandangan positif, sabar, tekun dan pandai bersyukur, adaptif/lentur terhadap perbedaan dan perubahan, serta menyukai kehidupan harmoni. Hal ini terbukti dalam sejarah, wilayah Nusantara sejak zaman kuno banyak dikunjungi oleh berbagai pendatang dari berbagai bangsa di dunia karena memang wilayah Nusantara berada di jalur lintasan pelayaran dan perdagangan dunia yang menghubungkan wilayah yang memiliki peradaban maju di Asia Timur (Tiongkok) dan peradaban maju di wilayah Asia Barat dan Timur Tengah (India, Persia, Mesir). Dalam catatan sejarah, tidak tercatat adanya konflik antara bangsa Nusantara dan bangsa-bangsa pendatang yang kemudian bermukim di Nusantara (Arab, India, Cina). Konflik antarbangsa terjadi ketika

datangnya bangsa Eropa yang semula melakukan perdagangan saling menguntungkan dengan bangsa Nusantara, namun kemudian muncul keinginan menguasai sehingga menerapkan sistem penjajahan dan kolonialisasi.

Bangsa-bangsa pendatang dari India, Arab, dan Cina, selain bermigrasi ke Nusantara untuk berdagang, juga membawa agama dan kebudayaannya sehingga terjadi perjumpaan silang budaya antara agama dan budaya yang dibawa bangsa pendatang dengan agama dan kebudayaan asli Nusantara. Nusantara sendiri, jauh ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing dari luar Nusantara, sudah memiliki sistem keyakinan agama dan kebudayaan yang maju. Terbukti dengan adanya situs-situs purbakala yang keberadaannya sejak ribuan tahun sebelum masehi. Hal ini membuktikan leluhur bangsa Indonesia sudah menjalani kehidupan beragama dan berkebudayaan maju. Pandangan ini sejalan dengan pendapat J.L.A. Brandes yang menyebutkan bahwa penduduk Asia Tenggara termasuk penduduk kepulauan Indonesia, telah mempunyai 10 kepandaian menjelang datangnya agama Hindu-Buddha (Wibowo, 2020: 19), yaitu:

1. Menguasai teknik irigasi
2. Memahami astronomi
3. Menguasai teknik navigasi dan pelayaran
4. Mengenal tata masyarakat yang teratur
5. Melaksanakan perdagangan sistem barter
6. Membuat figur boneka
7. Mengembangkan seni hias ornamen
8. Mempunyai instrumen musik
9. Mengenal pengecoran logam
10. Menggunakan tradisi lisan dalam menyampaikan pengetahuan.

Pendapat ini diperkuat dengan hasil kajian G. Coedes yang menjelaskan bahwa sebelum masuknya pengaruh asing seperti Hindu-Buddha, masyarakat Asia Tenggara termasuk Indonesia (Nusantara) telah memiliki pencapaian-pencapaian (Wibowo, 2020: 19–21) sebagai berikut:

1. Di bidang kebudayaan materi, mereka telah mampu

- a. mengolah sawah, bahkan dalam bentuk terasering dengan teknik irigasi yang cukup maju,
- b. mengembangkan peternakan kerbau dan sapi,
- c. menggunakan peralatan logam,
- d. menguasai navigasi dengan baik.

2. Di bidang sosial mereka telah mampu:
 - a. menghargai peran wanita dan memperhitungkan keturunan berdasarkan garis ibu,
 - b. mengembangkan organisasi sistem pertanian dengan pengaturan irigasinya.
3. Di bidang religi, mereka telah:
 - a. memuliakan tempat-tempat tinggi sebagai lokasi yang suci dan keramat,
 - b. melakukan pemujaan kepada arwah leluhur,
 - c. mengenal penguburan kedua dalam gentong, tempayan, atau sarkopagus,
 - d. mempercayai mitologi dengan sistem *binary*.

Kepandaian-kepandaian tersebut menjadi ciri khas masyarakat Nusantara dan membentuk lapisan dasar (*sub-stratum*) yang kuat sehingga ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara hanya menjadi lapisan atasnya (*super-stratum*). Sementara itu, lapisan dasarnya sama sekali tidak pernah lenyap dan justru memberi warna pada kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Nusantara. Hal inilah yang membedakannya dari kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di tempat-tempat lain di Asia Tenggara maupun di India.

Karakter dasar Nusantara yang mengedepankan hidup harmoni juga tecermin dalam sikap moderasi beragama, seperti yang dikemukakan Coedes sebelumnya. Hal ini terbukti dengan diterimanya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara yang kemudian dilakukan harmonisasi dengan menyerap sistem nilai dari luar untuk mengisi bagian-bagian yang dapat memperkaya dan memperindah kemas budaya

Nusantara (bagian *super-stratum*). Begitu pun ketika Islam masuk dan berkembang hingga mendominasi kehidupan beragama di Nusantara. Sesungguhnya ini tidak menghapuskan sistem keyakinan dan budaya asli Nusantara. Nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada sistem keyakinan Nusantara tetap bertahan, diserap, dan diharmoniskan dalam kehidupan beragama Islam sehingga menghasilkan apa saat ini yang disebut sebagai Islam Nusantara. Sebenarnya pola kehidupan moderasi beragama seperti ini telah diterapkan oleh penguasa-penguasa kesultanan Demak dan Mataram. Begitu pun masyarakat yang masih mempertahankan dan menganut agama leluhur Nusantara atau yang sekarang oleh negara dikategorikan atau dikenal sebagai komunitas penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat tersebut juga menjalankan sikap hidup beragama yang moderat dan toleran, sesuai dengan karakter dasar bangsa Indonesia, baik oleh komunitas yang bertahan dengan kemurnian ajaran agama leluhurnya, maupun yang melakukan inkulturasi terhadap agama yang datang dari luar Nusantara.

Implementasi moderasi beragama dan toleransi kehidupan agama leluhur

Nilai-nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia mengambil sikap moderat dalam beragama dan sudah menerapkan hidup harmoni dalam keragaman sebagai wujud yang lebih dari sekadar sikap toleransi, serta pemahaman dan kesadaran atas pluralisme sebagai suatu keniscayaan. Hal ini ditunjukkan dalam perilaku hidup keseharian, sebagaimana yang diterapkan pada masyarakat penganut/penghayat kepercayaan Kaharingan sejak masa pra-Hindu. Masyarakat Dayak, terutama pemeluk agama/kepercayaan Kaharingan, memiliki keyakinan bahwa menjaga keseimbangan kosmos merupakan “kewajiban” orang Dayak sehingga bagi mereka sangat krusial untuk menghindarkan atau menjauhkan diri dari segala macam jenis pertentangan dengan pihak mana pun, baik secara individu maupun kelompok. Pertentangan dan konflik bagi masyarakat Dayak akan menghasilkan ketidakseimbangan kosmos yang diyakini akan menyebabkan malapetaka dan musibah yang sesungguhnya.

Abdul Rachman Patji dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), dalam buku hasil penelitiannya, mengemukakan bahwa jiwa dan semangat kepercayaan Kaharingan sangat mengedepankan kehidupan yang damai, kerja sama, dan solidaritas yang tinggi terhadap penganut agama lainnya. Secara faktual, masyarakat Dayak bersedia dan rela untuk selalu hidup damai berdampingan dengan masyarakat dan kelompok yang berbeda dengan kelompoknya. Kelompok yang bervariasi atau serba multi (agama, suku, identitas, dll.) sesungguhnya sudah diperlihatkan dalam kehidupan rumah Betang (rumah panjang, adat, suku-suku) Dayak. Betang mengaktualisasikan kehidupan nyata masyarakat Dayak yang damai, bernuansa kekeluargaan, menjunjung kesetaraan, penuh toleransi, solidaritas, demokratis, sebagaimana yang dicita-citakan serta diharapkan oleh seluruharganya (Qoyim, 2003: 65–66).

Suku Dayak, menurut M. Saleh Buchari, memiliki rumah panjang yang disebut “Betang” dengan jumlah anggota keluarga yang relatif banyak karena diisi sejumlah keluarga, termasuk anak, menantu, para cucu-cucu yang dapat saja beragam agama yang dianutnya. Tidak ada paksaan harus memeluk kaharingan sebagaimana yang dianut oleh kedua orangtuanya secara turun-temurun (budaya suku Dayak sangat terbuka/cair dalam beragama). Alasan yang fundamental mendasari etnik Dayak pada sikap toleransi beragama adalah pandangan bahwa masing-masing individu di kemudian hari akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Sang Pencipta. Prinsip dasar dan keutamaan dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing dilandasi oleh kehidupan yang harmonis, keseimbangan yang penuh dengan kebijakan, serta mengormati aturan, nilai, dan norma yang disepakati bersama (Qoyim, 2003: 101–102).

Sistem nilai yang senada juga ditunjukkan dalam kehidupan masyarakat penganut agama (penghayat kepercayaan) Malesung pada masyarakat Minahasa yang juga kental dengan sikap moderasi beragama dan toleransi terhadap keragaman. Diyakini bahwa Malesung merupakan kepercayaan yang bersumber dari TAAR UM

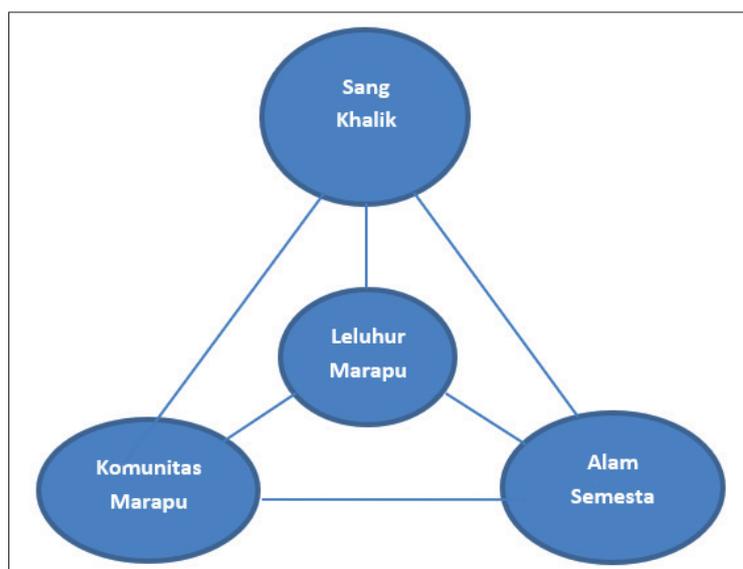
WATU PINAWELENGAN, berupa lima dasar warisan leluhur, yaitu:

1. *Malo'orne siempung*: pengakuan dan penyembahan kepada pencipta dan alam semesta.
2. *Maleos leosan*: baik kepada Sang Pencipta, antarmanusia, dan alam semesta.
3. *Maesaan*: menyatukan tubuh, jiwa dan roh, lantas bersatu antara manusia dan alam semesta.
4. *Maopoaan*: menghormati yang tua, menghargai yang muda, menjunjung toleransi antaragama.
5. *Masawangan*: baku bantu antarsesama manusia.

Soal perawatan terhadap keberagaman sudah dipraktikkan oleh leluhur Minahasa penganut Malesung yang dikenal dengan ungkapan "*raica wana siparukuan, raica wana sipakurun, se toupeleng, mapute waya*" (tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipuja, semua sama, sama semua). Ungkapan ini menunjukkan pandangan hidup dalam ajaran Malesung yang menganggap kedudukan manusia setara. Oleh karena itu, manusia harus saling menghormati dan saling menghargai agar tercapai kerukunan hidup yang damai dan bahagia.

Prinsip keseimbangan dan harmoni sebagai pedoman untuk keselamatan dalam masyarakat Sumba penganut kepercayaan Marapu dikenal dengan prinsip "*ina nuku-ama hara*", yang terwujud dalam dan melalui relasi antara Sang Khalik-Leluhur-Komunitas Marapu-Alam. Relasi yang seimbang dan harmonis ini secara etis menuntut penganut Marapu untuk tidak mengedepankan egonya, melainkan selalu menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain.

Begitu pula halnya dengan sistem keyakinan agama Suku Sabu yang memahami dan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tempatnya sendiri dan perannya dalam keluarga, masyarakat, dan alam raya, sesuai dengan hukum harmoni. Hukum harmoni tersebut biasanya dijabarkan atau dilembagakan melalui apa yang disebut dengan "*uku rai*" atau adat-istiadat yang berfungsi sebagai pengatur tata-tertib dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat dan dalam hubungannya dengan alam. Dalam pandangan orang Sabu, adat-istiadat sama dengan syariat agama; hukum adat sama dengan hukum agama. Ketaatan kepada hukum harmoni ada pahalanya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Kehidupan mereka akan bebas dari segala bencana dan penyakit, bahkan kehidupannya akan diliputi damai



Sumber: Hasil analisis penulis

Gambar 2. Relasi Harmoni antara Sang Khalik-Leluhur-Komunitas Marapu-Alam

sejahtera. Setiap orang boleh berbeda pendapat, tetapi hendaknya harus dipelihara harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan perseteruan dipandang salah. Oleh karena itu, hendaknya dicari penyelesaiannya, dan tolok ukurnya adalah adat-istiadat dan keputusan tua-tua adat. Inilah toleransi dalam kehidupan orang Sabu (Kaho, 2005: 82–83).

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Karakter bangsa Indonesia yang moderat dalam kehidupan beragama serta menerapkan pola hidup harmoni dalam keragaman keyakinan beragama terbukti dalam catatan sejarah. Bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa-bangsa dari luar Nusantara, termasuk terhadap agama-agama yang dibawanya. Selain itu, juga diperlihatkan dalam falsafah dan pandangan hidup yang dianut masyarakat sebagai pedoman hidupnya. Sikap moderasi beragama, misalnya, tecermin dalam pandangan hidup orang Sunda terkait prinsip hidup yang harus “*sineger tengah*” (mengambil posisi di tengah) dan ungkapan “*ulah hareup teuing, ulah tukang teuing*” (jangan terlalu depan dan jangan terlalu belakang), serta ungkapan-ungkapan seperti *mangga tipayun* (silahkan di depan), *mangga ngiringan* (silakan saya mengiringi), *someah hade ka semah* (ramah dan baik terhadap tamu). Hal tersebut merupakan tuntunan hidup yang ramah, bersikap moderat, dan tidak menonjolkan diri, namun juga jangan sampai tertinggal.

Pandangan hidup orang Sunda tentang manusia sebagai pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Prof. Dr. Suwarsih Warnaen dkk. (1987: 92–93), menyimpulkan sifat orang yang dianggap baik. Sifat-sifat terpuji tersebut meliputi jujur, *bageur* (baik hati), sabar, besar rasa ingin tahunya dan ingin belajar, sederhana, suka menolong, waspada, hati-hati dalam melangkah, rendah hati, rajin, takwa, taat kepada orangtua, mudah diatur dalam hal tertentu, bijaksana, sopan, baik budi bahasa, punya rasa malu, *malapah gedang* (sopan santun dalam menyampaikan sesuatu tidak langsung ke pokok), punya harga diri, telaten, dan suka menepati janji.

Sikap hidup yang dianut bangsa Indonesia dan terkandung di dalam nilai-nilai kearifan lokal Nusantara terhadap perbedaan keyakinan beragama, tidak hanya sikap toleransi. Akan tetapi, lebih dari itu, yaitu kesadaran untuk mengusung kehidupan yang harmonis dalam perbedaan (inklusif) karena perbedaan disadari sebagai suatu keniscayaan dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini didukung dengan nilai-nilai kearifan yang dianut, misalnya pandangan hidup orang Sunda terkait hubungan antar sesama manusia. Pandangan tersebut menekankan pada sikap *silih asih-silih asah-silih asuh* (saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh). Selain itu, segala sesuatu dilakukan dengan mengutamakan cara gotong-royong sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketenteraman dan kekeluargaan. Namun, tidak sekadar terbawa-bawa saja, seperti juga dalam ungkapan “*kawas gula jeung peueut*” (bagai gula dengan nira yang matang), yang mengandung makna hidup rukun saling menyayangi, tak pernah berselisih.

Ungkapan senada dianut oleh masyarakat Timor sebagai tuntunan hidup sehat bahagia dalam bahasa Meto Timor dengan istilah “*lais monit aomina aoleko, lais neka mese*” (perihal hidup sehat bahagia, perihal bersatu padu). Maksudnya adalah hidup selaras sejahtera dan bahagia lahir batin; hidup sehat seperasaan antar sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Makna yang sama juga terdapat dalam ungkapan bahasa Jawa “*mong kinemong lan mad sinamadan*” yang berarti sama dengan makna *silih asih-silih asah-silih asuh* dan saling menghargai antar sesama. Hal ini dijumpai juga dalam ungkapan adat dalam bahasa Batak “*marsiaminaminan songon lampak ni gaol, marsitungkoltungkolan songon suhut di robean*”, yang maknanya adalah manusia harus selalu bersatu agar tahan menerima terpaan angin dan badai. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling membantu, saling menghormati hak dan kewajiban, serta saling merasa senasib sepenanggungan (Kemenbudpar, 2003: 50, 52, 54).

Hal ini diperkuat lagi dengan pandangan hidup dalam kaitan hubungan manusia dengan negara dan bangsanya yang hendaknya didasari oleh sikap menjunjung tinggi hukum, membela negara dan ikut kepada rakyat, serta mementingkan kerja sama dalam kekeluargaan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Pandangan ini tecermin dalam ungkapan “*kudu nyanghulu kana hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea*” (harus mengarahkan kepala pada hukum, mengarahkan kaki ke negara, bermufakat kepada orang banyak). Artinya, harus menjunjung tinggi hukum, berpijak pada ketentuan negara, dan bermufakat kepada kehendak rakyat. Hal serupa juga ditemukan pada ungkapan “*bengkung ngariung bongkok ngaronyok*” (lengkung dalam berkumpul, bungkok dalam berhimpun), yang mengandung makna bersama-sama dalam suka dan duka (Warnaen, 1987: 13,16).

Tuntunan hidup lainnya yang ditemukan pada ajaran dan kearifan masyarakat Sunda di antaranya ungkapan dan tuntunan “*lahir kaulaning nagara, batin kaulaning rasajati, kuring kaulaning Gusti*” (lahirnya berbakti pada negara, batinnya berbakti pada rasa suci, dan akunya berbakti kepada Tuhan). Ini merupakan tuntunan untuk selalu berbakti kepada negara (bela negara) dengan tetap berlandaskan pada kesucian jiwa dan restu Tuhan yang Maha Esa.

Sikap moderasi beragama dan pola hidup harmonis dengan masyarakat yang berbeda keyakinan merupakan refleksi dari pandangan hidup yang memiliki kesadaran dan menghormati keberagaman (pluralisme). Pandangan ini sesungguhnya merupakan identitas bangsa Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Dr. Andrea Acri, seorang Ahli Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno yang berasal dari Italia sekaligus dosen di *l'École Pratique des Hautes Études, Université PSL* (Paris). Saat menggelar kuliah umum program pascasarjana di kampus Universitas Hindu Indonesia (UNHI) di Bali yang mengangkat tema “Siwa-Buddha”, Acri mengatakan: “tidak dimungkiri bahwa pluralisme menjadi salah satu ciri khas identitas Nusantara. Pemeluk agama-agama di Indonesia memiliki sifat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar sehingga memperkaya identitas keagamaannya.

Berbeda dengan di negara lain yang cenderung begitu ketat untuk menerima pengaruh dari luar” (Posbali.co.id, 2019). Ungkapan-ungkapan dan prinsip hidup tersebut dimanifestasikan dalam sikap hidup sehari-hari dan ditanamkan terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga menjadi tradisi dan budaya.

Pandangan hidup dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam setiap kearifan lokal etnis bangsa Indonesia, oleh para bapak-ibu bangsa kemudian digali kembali, dikaji, dirangkum, dirumuskan, dan disepakati menjadi falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, hal inilah yang menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Pancasila.

TANTANGAN MENUJU HIDUP HARMONI DALAM KERAGAMAN AGAMA

Politisasi agama

Perbedaan suku, ras, dan antargolongan di Indonesia secara umum sudah tidak menjadi masalah. Namun, persoalan tentang agama masih menjadi hal yang sensitif dan rentan dipolitisasi sehingga sering terjadi konflik. Hal ini dikarenakan banyaknya pandangan masalah agama terkait dengan jiwa sehingga tidak sedikit yang rela mengorbankan jiwa untuk membela agama. Tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan seringkali terjadi tanpa bisa dipahami secara logis. Kondisi demikian sangat mudah dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu dengan tujuan mengganggu kedamaian dan keutuhan bangsa Indonesia untuk menguasai kekayaan negeri. Banyak contoh kejadian di dunia yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Hal ini sangat membahayakan dan harus disadari oleh semua pihak yang mencintai negeri, khususnya pemerintah dan para pejabat negara, untuk betul-betul bijak dalam mengelola keberagaman keyakinan agama di Indonesia dan mencermati setiap perkembangan kehidupan beragama, serta mewaspadaai gerakan-gerakan politisasi agama di Indonesia.

Ketahanan budaya bangsa

Budaya suatu bangsa, termasuk sistem nilai dan norma kehidupan sosial spiritual yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terbentuk melalui proses alamiah yang panjang dari generasi ke generasi. Hal inilah yang kemudian membentuk norma dan nilai yang dijadikan pedoman hidup. Budaya dan sistem nilai yang terbentuk, tentunya sudah harmonis dengan alam lingkungannya dan sesuai dengan karakter dasar manusia maupun masyarakatnya, serta sudah melewati berbagai cobaan dan tantangan, termasuk dampak perjumpaannya dengan sistem nilai yang datang dari luar. Konflik komunal dalam kehidupan bermasyarakat mungkin saja terjadi, namun dalam masyarakat tradisi sudah memiliki konsep tersendiri dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) untuk mencegah maupun mengatasinya. Sebagai contohnya, “rumah betang” di masyarakat Dayak untuk mencegah konflik dengan menerapkan keharmonisan hidup dalam keragaman, “pela gandong” di Maluku dan “bakar batu” di Papua sebagai media penyelesaian konflik. Atau yang lebih umum dan menyeluruh hampir di semua etnis Nusantara adalah budaya *rembug/sawala* atau musyawarah dalam rangka mencegah maupun menyelesaikan konflik.

Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan salah satu kunci dalam menjaga harmoni kehidupan dalam keberagaman. Untuk itu, perlu dicegah tindakan-tindakan pemaksaan perubahan budaya dan pemaksaan sistem nilai bangsa asing yang dikaitkan dengan norma-norma agama, termasuk juga pencegahan terjadinya pragmatisme dalam kehidupan beragama maupun upaya marginalisasi dan hambatan untuk menghidupkan norma dan sistem nilai kearifan lokal bangsa. Berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, konflik-konflik yang terjadi ternyata dapat diselesaikan dengan menggunakan norma dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam budaya bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, ketahanan budaya bangsa patut menjadi perhatian dalam menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa, yang artinya pengembangan moderasi beragama dan membangun harmoni hidup dalam keberagaman

tidak bisa dilepaskan dengan upaya membangun ketahanan budaya bangsa.

Konflik-konflik keagamaan.

Konflik keagamaan, baik yang bermuatan politik maupun tidak bermuatan politik, bukanlah barang baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, terjadi berselang-seling antara konflik dan kompromi atau perselisihan dan rekonsiliasi. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara, upaya-upaya pencegahan konflik dilakukan melalui perkawinan lintas agama yang berkelindan antarkerajaan. Hal ini bisa terjadi karena dalam norma dan sistem agama leluhur Nusantara, yang kemungkinan juga diserap dalam norma Hindu-Buddha Nusantara, perkawinan beda agama bukanlah masalah besar yang dapat menghambat perkawinan.

Dalam sejarah leluhur bangsa Indonesia, konflik keagamaan yang berkelindan dengan politik dan perebutan kekuasaan mencuat pada peristiwa penyerangan kerajaan Majapahit oleh Demak, penyerangan Kerajaan Talaga dan Kerajaan Galuh oleh Kesultanan Cirebon, Demak dan Kuningan, serta penyerangan Kerajaan Sunda-Pajajaran oleh Kesultanan Banten dibantu Cirebon dan Demak.

Konflik keagamaan antara penguasa dan rakyat serta tokoh masyarakat juga terjadi di kesultanan Demak pada masa kekuasaan Pati Unus. Hal ini akibat pemaksaan penerapan norma Islam secara keras kepada rakyatnya sebagai buntut kegagalan penyerangan Pati Unus terhadap Malaka yang dikuasai Portugis. Selanjutnya, pada masa kesultanan Mataram konflik di masyarakat terus terjadi berselang-seling dengan rekonsiliasi/kompromi, terutama di masa pemerintahan Sultan Agung Mataram yang berkompromi dengan mengawinkan norma Islam dengan norma Jawa, lalu konflik di masa Amangkurat I, Pakubuwono II, maupun di masa kekuasaan Mangkunegara IV.

Di wilayah Sumatra Utara, juga tercatat konflik keagamaan ketika pasukan Padri menerapkan syariat Islam secara keras kepada masyarakat Minangkabau dan melakukan penyerangan hingga pembakaran istana kerajaan Sisingamangaraja di Tanah Batak.

Konflik-konflik keagamaan di Nusantara umumnya terjadi akibat berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme dalam kehidupan beragama. Konflik tersebut terjadi sejak dibukanya Terusan Suez, yang berdampak pada meningkatnya akses pelayaran internasional. Hal ini memungkinkan banyaknya kelompok kelas menengah Nusantara, khususnya di Jawa, berkesempatan pergi haji dan bertemu sekaligus menjalin hubungan bisnis dengan tokoh-tokoh Wahabi di Arab. Inilah kanal bagi penyebarluasan gagasan gerakan pemurnian Islam, terutama pada periode tahun 1850–1860-an dengan tumbuh suburnya gerakan-gerakan reformis Islam Jawa yang sangat kentara dalam penolakan mereka terhadap gagasan-gagasan yang bersifat Jawa. Mereka berupaya membersihkan Islam lokal yang dipandang bid'ah, di antaranya menolak wayang serta berbagai hiburan khas Jawa dan menganggap semuanya tidak Islamis (Ricklefs, 2013: 46–48).

Perkembangan paham intoleran dan radikalisme mengalami pasang-surut sejak zaman Mataram hingga kini. Tidak muncul di masa kolonial, mulai bangkit di masa Orde Lama, tiarap namun terus bergerak sembunyi-sembunyi di masa Orde Baru, dan mulai menampakkan diri di periode akhir ORBA, kemudian muncul dan terus berkembang dengan subur di masa Reformasi hingga kini. Dengan timbulnya berbagai kasus intoleransi pada konteks Indonesia, salah satu biang persoalan adalah penolakan berbasis identitas. Persoalan identitas menjadi basis cukup besar terhadap meningkatnya intoleransi antarkelompok masyarakat minoritas, seksual, agama, dan etnis (Setara Semartabat, 2020: 43). Jenis kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sangat beragam, antara lain pelarangan pendirian tempat ibadah, penolakan bertetangga dengan orang yang tidak seagama, penutupan tempat ibadah, perusakan tempat ibadah, pembakaran tempat ibadah, pembubaran terhadap kegiatan ritual, dan pengusiran dari tempat tinggalnya.

SETARA Institute yang memantau kebebasan beragama juga mencatat peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama yang meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 216 insiden pada tahun 2010, 244 insiden pada tahun 2011,

dan 264 insiden pada tahun 2012. Sebagian besar dialami oleh warga Ahmadiyah, Kristen, Syiah, Sufi, Buddha, dan penghayat kepercayaan atau penganut agama lokal (Setara Semartabat, 2020: 43).

Beberapa kasus intoleran dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mencuat hingga pemberitaan nasional, serta penyelesaiannya masih terkatung-katung, antara lain:

1. Tanggal 3 Mei 2022 di Desa Mareje-NTB, terjadi pembakaran 6 rumah warga umat Buddha dan puluhan warga melarikan diri ke hutan serta ratusan warga dari penganut Buddha yang mengungsi dari rumahnya akibat serangan sekelompok orang,
2. Perusakan dan pembakaran Masjid Ahmadiyah oleh sekelompok warga setempat pada tanggal 3 September 2021 di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempuuh, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3. Larangan tidak boleh memasang segala bentuk salib dan tidak boleh ada kegiatan ibadah umat Kristen di rumah Sumarni oleh Kepala Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 September 2020.
4. Larangan perayaan Natal dan Tahun Baru di Nagari Sikabau Kabupaten Dharnasraya dan Nagari Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, bahkan tidak boleh melakukan ibadah layaknya umat agama lainnya (2020).
5. Penyerangan warga jemaat Ahmadiyah pada tanggal 19 dan 20 Mei 2018 di Grepek Tanak Eat Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur yang mengakibatkan 8 rumah hancur, 4 sepeda motor hancur, dan 24 warga Ahmadiyah dievakuasi.
6. Larangan beribadah dan larangan membangun gereja bagi jemaat GKI Yasmin di Parung Panjang Kabupaten Bogor dan jemaat HKBP Filadelfia Bekasi sejak tahun 2017 hingga kini.
7. Pada bulan Februari 2017, terjadi penyegelan Masjid Al Hidayah milik umat Ahmadiyah

di Sawangan Kota Depok oleh Pemerintah Kota Depok.

8. Pemencaraan Ibu Meiliana warga Tionghoa, serta perusakan 3 buah vihara, 8 kelenteng, satu tempat pengobatan dan satu rumah milik Meiliana pada bulan Juli 2016, di Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, akibat Ibu Meiliana dituduh melakukan penodaan agama atas pernyataan keberatannya terhadap suara toa di masjid yang terlalu keras.
9. Perusakan Masjid Ahmadiyah oleh sekelompok orang di Desa Purworejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada bulan Juli 2016.
10. Tanggal 5 Januari 2016, Pemda Kabupaten Bangka menerbitkan surat pengusiran warga Ahmadiyah dari lingkungan Srimenanti, Sungai liat, kecuali mereka mau bertobat.
11. Peristiwa Cikeusik pada tanggal 6 Februari 2011, sejumlah massa sekitar 1500 orang mengatasnamakan Gerakan Muslim Cikeusik menyerang lokasi jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang yang mengakibatkan 6 orang warga Ahmadiyah meninggal, satu mobil dibakar, dan satu rumah hancur.
12. Tahun 2012 ratusan warga penganut Syiah di dua desa di Kabupaten Sampang Madura diusir dan rumahnya dibakar. Satu orang meninggal dunia akibat peristiwa kekerasan tersebut. Setelah sekitar 8 tahun terkatung-katung mengungsi di Sidoarjo, pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 270 orang pengungsi melakukan pembaiatan menjadi Suni atau Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) dengan harapan bisa pulang kampung.
13. Penyerangan terhadap warga jemaat Ahmadiyah di NTB sejak tahun 1998 yang terus berlangsung dan berujung pengusiran di tahun 2005 hingga 2006. Peristiwa ini memaksa warga Ahmadiyah mendiami pengungsian di Wisma Transito di Mataram dan Praya. Hingga kini sudah 18 tahun berjalan, namun belum juga ada solusi.

Hal yang menjadi faktor pendorong tumbuh suburnya paham intoleransi dan radikalisme

di Indonesia adalah kurang tegasnya aparat keamanan terhadap berbagai tindakan intoleransi dan radikalisme, termasuk peristiwa/kasus tersebut, akibat adanya kegamangan untuk menindak ketika berkaitan (persinggungan) dengan aspek keagamaan *mainstream*.

Penyusupan paham intoleran dan radikalisme terhadap institusi negara

Ancaman bahaya terhadap kesatuan bangsa dan keutuhan negeri, berdasarkan pengalaman negera-negara yang hancur akibat paham intoleran dan radikalisme, adalah ketika terjadi penyusupan kelompok dan paham ini terhadap institusi negara. Penyusupan tersebut tidak disadari terus menguat, terutama pada institusi pertahanan dan keamanan negara, misalnya institusi TNI dan POLRI.

Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Pancasila sedang mengalami pergolakan yang serius karena banyak pihak, termasuk di lingkungan TNI yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Berdasarkan data yang dimilikinya, Ryamizard menuturkan ada sekitar 3% anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme. Hal ini disampaikan Ryamizard Ryacudu saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani, Cilangkap Rabu (19/6, 2019). Data ini menambah daftar pihak-pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan Khilafah. Ryamizard memaparkan sebanyak 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA yang setuju dengan negara Islam/khilafah. Selanjutnya, ada 18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, serta 19,4% PNS dan 19,1% pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila (CNN Indonesia-online, 2019). Keprihatinan ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris yang mengingatkan semua pihak untuk semakin mewaspadaai modus-modus terorisme dalam mencari simpatisan. Disebutkan bahwa aparat keamanan di TNI maupun POLRI ada yang sudah terpapar paham radikalisme hingga keharusan mewujudkan negara dengan sistem khilafah. Mereka semakin lihai berkamouflage

(Tempo.co.id, 2022). Bahkan menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, M. Najih, menyatakan bahwa BNPT mencatat lebih dari 30 personel TNI-POLRI sudah terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia. Bukan hanya terpapar paham radikal, tetapi sudah terlibat teror (VIVA.co.id., 2021).

Penyusupan paham radikalisme pada institusi aparatur negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di semua jenjang pemerintahan juga sudah terjadi, dan dapat dirasakan keberadaannya, termasuk pada perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN/BUMD). Oleh karena itu, pemerintah harus mencermati, mewaspada, dan bertindak bijaksana dalam mencegah perkembangannya, serta segera mencari solusi.

Penyusupan paham intoleransi dan radikalisme juga sudah terjadi pada institusi pendidikan di semua tingkatan, baik pada lembaga pembina (kementerian dan dinas-dinas pendidikan, dan kementerian agama beserta jajarannya). Penyusupan nilai-nilai radikalisme ke sekolah dapat masuk melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan sekolah. Hal ini diungkap oleh hasil penelitian yang dilakukan Maarif Institute dari tanggal 2 hingga 21 Oktober 2017 (Republika.co.id., 2018). Penelitian ini menemukan penyusupan nilai-nilai radikalisme melalui pintu alumni dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya dalam aktivitas pengajian yang difasilitasi alumni. Celah kedua melalui guru adalah dengan cara indoktrinasi di dalam dan di luar kelas, misalnya doktrin yang menyatakan negara *thogut* yang kemudian disampaikan kepada para siswa di dalam kelas. Celah ketiga melalui kebijakan sekolah yang umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan kepala sekolah atau memang kepala sekolahnya sudah terpapar paham radikalisme, melalui kebijakan yang dikeluarkan sekolah yang kerap membuka lebar pintu bagi kelompok intoleran dan radikal untuk membina siswa dalam penguatan keagamaan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran sekolah tentang pergerakan radikalisme melemahkan mekanisme ketahanan warga sekolah dalam menghadapi hal tersebut. Penyusupan nilai-nilai radikalisme ke sekolah

juga terdeteksi melalui narasi-narasi dalam buku-buku pelajaran sekolah.

PENUTUP

Moderasi beragama dan toleransi yang diwujudkan dalam perilaku hidup harmoni dalam keragaman suku, agama, ras dan antargolongan merupakan kunci kerukunan hidup, kedamaian, dan kebahagiaan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Moderasi beragama dan toleransi hingga inklusifisme merupakan identitas bangsa Indonesia yang menjadi keniscayaan karena alam telah membentuknya dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama, pluralisme, toleransi dan hidup harmoni dalam keragaman keyakinan beragama tidak perlu dicari keluar Nusantara. Nilai-nilai kearifan dan pandangan hidup seperti itu sudah eksis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Moderasi beragama dan hidup bersama secara harmoni (inklusif) dengan mereka yang berbeda di Nusantara bukan sekadar konsep, melainkan sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman leluhur Nusantara pada zaman peradaban kuno. Hal ini terbukti dalam catatan sejarah ketika kedatangan agama-agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam hingga Nasrani dan agama dunia lainnya ke bumi Nusantara, diterima dengan baik oleh bangsa Nusantara, tanpa adanya hambatan atau penentangan.

Budaya gotong-royong yang hidup dan dianut oleh setiap etnis di seluruh wilayah Nusantara merupakan nilai kearifan lokal yang lebih tinggi dari sekadar toleransi. Namun, sayangnya budaya ini sudah mulai luntur, apalagi pada masyarakat perkotaan yang sudah berorientasi material. Untuk itu, budaya gotong-royong perlu didorong agar kembali marak dan menjadi panutan masyarakat bangsa Indonesia.

Ketahanan budaya merupakan salah satu kunci dalam menjaga harmoni kehidupan dalam keberagaman. Di dalam budaya terkandung norma dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri, yang sudah terbukti mampu mengatasi segala perbedaan dan mencegah berkembangnya potensi konflik. Oleh karena itu,

ketahanan budaya bangsa patut menjadi perhatian dalam menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa. Artinya, pengembangan moderasi beragama dan membangun harmoni hidup dalam keberagaman tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun ketahanan budaya bangsa.

Kemungkinan terjadinya konflik komunal dalam kehidupan sudah disadari sebagai suatu keniscayaan. Untuk itu, masyarakat tradisi Nusantara sudah mengantisipasi dengan nilai-nilai kearifan, seperti rumah Betang di masyarakat Dayak, pela-gandong di Maluku, dan bakar batu di Papua. Hal tersebut merupakan contoh-contoh nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat, dan tentu pada etnik lainnya di Nusantara juga pasti memiliki kearifan dalam mengatasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia-online. (2019)
- Kaho, R. R. (2005). *Orang Sabu dan budayanya*. Yogya Global Media.
- Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan. (2003). *Nilai-nilai luhur budaya spiritual*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Posbali.net. (2019). Bahas “Siwa Budha”, Kuliah Umum di Unhi Hadirkan Dr Andrea Acri.
- Qoyim, I. (ed). (2003). Agama & pandangan hidup studi tentang “local religion” di beberapa wilayah Indonesia- studi tentang kaharingan di Masyarakat Dayak Kalimantan dan Sunda Wiwitan di Masyarakat Badui Banten. Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI.
- Republika.co.id. (2018).
- Ricklefs, M. C. (2013). *Mengislamkan Jawa- sejarah Islamisasi Jawa dan penentangannya dari 1930 sampai sekarang*. Serambi.
- Subagya, R. (1979). *Agama dan alam kerohanian asli di Indonesia*. Yayasan Cipta Loka Caraka. Penerbit Nusa Indah.
- Tempo.co.id. (2022). BNPT Sebut Ada Anggota TNI dan Polri yang Terpapar Radikalisme.
- Tim Penulis. (2020). *Setara semartabat: Jalan pembangunan Indonesia inklusif*. IRCiSoD.
- VIVA.co.id. (2021). MUI: 30 Personil TNI-POLRI Terlibat Aksi Terorisme.
- Warnaen, S., Rusyana, Y., Wibisana, W., Garna, Y., & Djiwapradja, D. (1987). *Pandangan hidup orang Sunda: seperti tercermin dalam tradisi lisan dan sastra Sunda*. Bandung. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Ditjen Kebudayaan, Depdikbud.
- Wibowo, M. A. (2020). *Peradaban kuno: sebuah gambaran utuh*. Herya Media.